

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TATA RUANG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Beni Febriansyah¹, Feri Irawan², Kholil Albab³, Frans Gustian⁴

^{1,2,3,4)}Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

Email Correspondence: bfebriansyah28@gmail.com

ABSTRACT

The title of this research was "implementation of policies on spatial planning by the Public Works and Spatial Planning Department of Musi Banyuasin District". The approach used in this research was a qualitative approach, with a descriptive analysis method. The data source of this research used source triangulation. This triangulation was done by comparing and testing the degree of truth or validity of information obtained through different times and tools in qualitative research. Based on the results of research, the implementation of policies on urban spatial planning by the Public Works and Spatial Planning Department of Musi Banyuasin District had not run optimally. Although the Public Works and Spatial Planning Department of the Musi Banyuasin District had limited funding, facilities and human resources, effective inter-organizational communication from stakeholders and related agencies was active involvement of the local government through funding collaboration supports the implementation of policies on spatial planning by the Public Works and Spatial Planning Department of the Musi Banyuasin District.

Keywords: *Implementation, policy, spatial*

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “implementasi kebijakan tentang tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengujikan derajat kebenaran atau validitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin belum berjalan optimal. Meskipun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin mengalami keterbatasan sumber dana, sarana dan sumber daya manusia, akan tetapi dengan adanya komunikasi antar organisasi yang efektif dari stakeholder dengan instansi terkait keterlibatan secara aktif dari pemerintah daerah melalui kolaborasi pendanaan menopang jalannya implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, tata ruang*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik atau sering disebut pelayanan umum, pelayanan masyarakat atau *Public service* merupakan salah satu aktivitas pemerintah yang selalu menjadi

perhatian masyarakat. Salah satu tonggak penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun esensi undang-undang tersebut pada

dasarnya adalah desentralisasi atau pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu jenis layanan publik adalah program tentang tata ruang kota yang merupakan salah satu program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. Dipilihnya program tata ruang kota sebagai tema dalam penelitian ini, karena peneliti menyadari betapa pentingnya peranan tata ruang kota dalam aktivitas hidup dan kehidupan manusia. Tetapi kebijakan atau kesepakatan bersama tidak akan berguna jika tidak diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan secara berkelanjutan oleh para pelaku yang seharusnya bisa membawa perubahan jika melaksanakan perannya dengan maksimal. Seperti yang kita ketahui kepala daerah masih banyak yang belum mengenal konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mereka melakukan pembangunan daerahnya tanpa ada perencanaan ke depannya padahal untuk menciptakan kota yang nyaman, penataan kota harus direncanakan secara matang tidak asal, tetapi ini lah yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Sebagian dari daerah yang ada di Indonesia sudah mulai memperhatikan

perencanaan tata ruang kota misalnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah (RT/RW), namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan dibiarkan. Seharusnya kita mencontoh negara maju seperti Belanda yang membuat rencana tata ruang kota dengan matang hingga beratus-ratus tahun tidak berubah, tetapi itu kembali lagi kepada kita yang melaksanakannya. Bukti nyata dari masalah-masalah inkonsistensi pemerintah dalam penataan kota adalah urbanisasi yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Pemerintah terus melakukan pemberian yang akan berakibat anggapan bahwa jika pemerintah diam berarti masyarakat berada di posisi yang benar. Selain masalah tersebut adalah masalah transportasi yaitu semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor pribadi.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini memusatkan (fokus) pada implementasi kebijakan tentang tata ruang kota Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan demikian dapat dirumuskan judul penelitian ini yaitu: "*implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan*

Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Bardach, steiss & Daneke (Patton & Sawicki: 1987) bahwa proses implementasi, merupakan seperangkat permainan dimana banyak aktor melakukan manuver tertentu untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pressman dan Wildavsky (1984:21) yang digelari sebagai pencetus konsep Implementasi Kebijakan Publik, menyatakan bahwa:

“implementation, to us, means just what Webster and Roger say it does; to carry out, accomplish fulfill, produce, complete.

But what is it being implemented? A policy, naturally. There must be some thing out their prior to implementation; otherwise there would be nothing to move toward in the process of implementation. A verb like “implement” must have an object like “policy”. But policies normally contain but goals and the mean for achieving them. How, then, do we distinguish between a policy and its implementation?”

Ripley dan Franklin (1986:4) menuntun pemikiran bahwa untuk memahami konsep implementasi kebijakan dibutuhkan pengertian tentang serangkaian kegiatan sebagai berikut:

Implementation is what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output. The term refers to the set of activities the follow statements of intent about program goals and desired result by government officials, implementation encompasses action (and nations) by a variety of actors, specially bureaucrats, designed to put programs into effect, ostensibly in such a way as to achieve goals”.

Grindle (1980:1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam

prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan.

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Agar kebijakan implementatif, maka dikenal beberapa pendekatan. Secara teoritik empirik, pendekatan ini dianggap memadai sebagai alat bantu atau penguatan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Walau dari berbagai pendekatan praktiknya membutuhkan pertimbangan komprehensif sehingga pendekatan yang dipilih, diadaptasi atau mungkin bahkan dikombinasi adalah teknis sesuai kebutuhan.

Untuk kepentingan implementasi kebijakan, bukan merupakan monopoli secara linear dari hanya para ahli kebijakan saja, tetapi bisa diadopsi dari para ahli ilmu-ilmu sosial lain, baik dari pakar ilmu politik, pakar organisasi dan manajemen maupun dari para ahli lainnya. Dengan kata lain untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicolas Henry (1998:33) yaitu: 1.Pendekatan Politik, 2.Pendekatan Struktural, 3.Pendekatan Prosedural dan managerial, 4.Pendekatan Perilaku

3. Konsep Pelayanan Publik

Pengertian publik dalam administrasi publik sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang akan diberikan. Artinya, sebelum kita memberikan pelayanan publik kita harus dapat membedakan publik itu sendiri. Frederickson (1997: 47) membagi publik ke dalam 5 (lima) prespektif: (1)*Publik sebagai kelompok minat*, (2)*Publik sebagai pemilih rasional* (public choise), (3)*Publik seperti direpresentasikan*, (4)*Publik sebagai pelanggan*, (5)*Publik sebagai citizen*.

Berdasarkan pembagian publik di atas, yang termasuk publik dalam penelitian ini adalah publik dalam prespektif ke 4 (keempat), bahwa individu sebagai pelanggan (klien) dan birokrat sebagai pelayan atau *civil service*. Wahab (2001:139-141) mengatakan bahwa pelayanan yaitu: melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, sehingga kata pelayanan mengandung arti (1).Adanya pihak yang melayani, yang dapat juga disebut pelayan, (2).Adanya pihak yang dilayani, yang dapat juga disebut pelanggan, (3).Terjadinya proses melayani-dilayani atau memberi menerima. Demikian juga menurut Henry (2004:249) mengatakan bahwa “*the civil services has been the historic locus of*

public administration". Sedangkan Burns (dalam Napitupulu, 2007:144) mengatakan bahwa "*civil service*" adalah lembaga mediasi yang memobilisasi sumber daya manusia dalam pelayanan urusan-urusan sipil dan negara di wilayah tertentu".

Adapun definisi konsep kualitas menurut para ahli yaitu Kotler (1997:49) mengatakan "Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat". Helriegel et.al (2005: 130) mengatakan "*Quality is how well a product or service what it is supposed to do how closely and reliably is satisfies the specification to which it buitt or provided*". Robbins dan Coulter (2005:502) mendefenisikan "*Quality as the ability of product or service to reliably do what it's supposed to do and satisfy customer expectations*".

Dalam Buhl Penyusunan Standar Pelayanan Publik LAN RI (2003:24-27) tantangan dan kendala yang mendasar dalam pelayanan publik adalah: (1)Kontak antara pelanggan dengan penyedia pelayanan, (2)Variasi pelayanan, (3)Para Petugas pelayanan, (4)Stuktur organisasi, (5)Informasi, (6)Kepakaan permintaan dan penawaran, (7)Prosedur, (8)Ketidakpercayaan publik terhadap kualitas pelayanan

Kemudian Pendapat Lovelock dan Wright (2005:15) mengemukakan 4 (empat) fungsi inti yang harus dipahami penyedia layanan jasa, yaitu: (1)Memahami persepsi masyarakat yang senantiasa berubah tentang nilai dan kualitas jasa atau produk, (2)Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan pelayanan, (3)Memahami arah pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas yang diinginkan masyarakat terwujud, dan (4)Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas jasa/produk tercapai dan kebutuhan setiap *stakeholders* terpenuhi.

Menurut Zeithaml, et al. (1990:36-37) mengemukakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi harapan (kepuasan) si konsumen yakni: (1) *Word-of-mouth communication*, (2) *Personal needs*, (3) *Past experience*, (4) *External communication from the service provider*,

4. Pengertian Tata Ruang Kota

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya Land use adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut rencana tata ruang wilayah nasional, yang dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah

(rtrw) tersebut perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. rencana tata ruang wilayah kota atau RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Tata ruang antara daerah perkotaan dan pedesaan pastilah berbeda, Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan/zona di wilayah perkotaan dibagi dalam beberapa zona sebagai berikut: (1)Perumahan dan permukiman, (2)Perdagangan dan jasa, (3)Industri, (4)Pendidikan, (5)Perkantoran dan jasa, (6)Terminal, (7)Wisata dan taman rekreasi, (8)Pertanian dan perkebunan, (9)Tempat

pemakaman umum, (10)Tempat pembuangan sampah.

Tata ruang kota pun tidak sembarangan di dalam menata suatu kota. Tata ruang sendiri pun ada bidang ilmu yang mempelajari secara dalam bagaimana kota tersebut akan di tata. Bidang ilmu itu sendiri adalah planologi. Planologi berasal dari kata plan artinya rencana. sehingga planologi bermakna studi tentang rencana. Orang yang profesional dalam bidang planologi disebut planolog, meski saat ini lebih populer disebut planner. Program studi planologi lebih dikenal dengan PWK (Perencanaan Kota dan Kota). Planologi memang sangat berhubungan dengan tata kota, namun planologi tidak hanya mengkaji dan mempelajari masalah penataan kota. Cangkupan tanggung jawab dari disiplin ilmu adalah mulai dari menentukan penggunaan suatu lahan hingga menentukan kebijakan suatu negara. Maka dari itu planologi seringkali bersinggungan dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik.

Secara garis besar planologi atau perencanaan wilayah dan kota adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pada masa yang kan datang. Dalam merencanakan suatu kota ternyata banyak

sekali yang harus di pertimbangkan oleh perencana misalnya kondisi ekonomi, sosial, budaya suatu wilayah dan yang lain-lain.

Hasil dari perencanaan kota dan wilayah tentunya ada berbagai tingkatan, yaitu:

- (1)Rencana Tata Ruang Nasional,
- (2)Rencana Tata Ruang Propinsi,
- (3)Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah. (RTRW),
- (4)Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan pada upaya untuk memahami dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. Dinamika yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, dimana hanya orang-

orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Seperti: informan pemerintah, pimpinan, jajaran pegawai di Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat, Konsultan, LSM.

Sumber data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengujikan derajat kebenaran atau validitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dilakukan dengan jalan:

- (1)membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti;
- (2)membandingkan pernyataan informan yang disampaikan di depan umum dengan yang apa yang disampaikan oleh informan tersebut secara pribadi;
- (3)membandingkan apa yang disampaikan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang disampaikan dalam kurun waktu tertentu;
- (4)membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan pihak lain seperti rakyat biasa, masyarakat berpendidikan yang berbeda, masyarakat dengan status sosial yang berbeda, dan dari kalangan pemerintahan.
- (5)membandingkan hasil wawancara

dengan dokumen yang mendukung atau berkaitan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi metode. Triangulasi metode ini dilakukan menggunakan dua strategi yaitu: (1) pengecekan derajat kebenaran temuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan dua metode atau lebih untuk melakukan penelitian ini, misalnya menggunakan metode wawancara dan metode observasi dengan melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

Lokasi penelitian di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Musi Banyuasin dengan waktu penelitian selama 6 bulan dimulai dari Februari 2021 sampai dengan Juli 2021

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Tentang Tata Ruang Kota Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang intinya mengamanatkan negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dengan strategi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin berupaya membuat terobosan dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, kenyamanan, keamanan dan kepastian dalam pelayanan publik masyarakat dalam memenuhi standar pelayanan prima.

Kebijakan tentang tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin dianalisis melalui proses aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi yang efektif, ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik sebagai berikut:

1.1. Analisis Dimensi Aspek Sumber-Sumber Kebijakan Implementasi Kebijakan Tentang Penataan Ruang

Berdasarkan informasi didapat bahwa faktor sumber daya, khususnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik merupakan faktor penting. Dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, pengelolaan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang baik akan dapat membantu dalam melayani masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang ada.

Implementasi kebijakan manajemen alternatif pelayanan publik membutuhkan dukungan aparat pelaksana dilapangan sehingga dapat mencapai sasaran atau tujuan. Aparat pelaksana yang ada dilapangan mengetahui secara mendalam bagaimana suatu kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan efektif, karena mereka lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Pemahaman situasi dan kondisi masyarakat membuat aparat pelaksana menjadi diperhitungkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan manajemen alternatif pelayanan publik akan terlihat dari ketepatan jumlah yang ada baik ketepatan jumlah sumber daya manusianya, sumberdaya keuangan maupun sarana dan prasarana lainnya. Anggaran merupakan wujud komitmen

dari *budget holder* kepada pemberi kewenangan. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan dilihat dari tercapainya target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Ketepatan dalam jumlah anggaran akan merupakan alat yang efektif untuk mengendalian dan penilaian kinerja.

1.2. Analisis Dimensi Aspek Standar dan Tujuan Kebijakan Implementasi Kebijakan Tentang Penataan Ruang

Hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik semakin menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pelayanan publik haruslah berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, tidak diskriminatif, terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat, mudah, dan terjangkau.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, badan publik juga terikat dengan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk dapat menyampaikan informasi secara terbuka.

Sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh informan, memberikan informasi tentang perbaikan proses komunikasi yang ada dalam Pelayanan Publik sebelum dan sesudah

diberlakukannya program. Sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh informan setelah diberlakukannya program ini kegiatan pelayanan jauh lebih baik terlebih dari sisi Komunikasinya.

Selaku perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, didalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kewenangan untuk dapat mengkomunikasikan dengan seluruh aparat pelaksana di dalam pelayanan publik bidang pendidikan. Dengan keterbatasan dana yang ada, Kepala Dinas memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada staf tentang segala apa yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Situasi yang ada memperlihatkan bagaimana pentingnya komunikasi yang harus dijalankan oleh implementor kebijakan pelayanan publik bidang pendidikan. Untuk dapat menjalankan komunikasi dengan baik diperlukannya kemampuan berbahasa, kejelasan informasi, ketepatan penggunaan sarana komunikasi sehingga pesan ataupun informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

1.3. Analisis Dimensi Aspek Badan Pelaksana Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Penataan Ruang

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Ripley (1985:10), menjelaskan bahwa, "struktur birokrasi pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi". Pendapat senada juga disampaikan oleh Affan (1998:14), bahwa,"birokrasi pemerintah bukan hanya sebagai salah satu proses variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan".

Hasil assessment yang dilaksanakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

- (1)Belum adanya rencana strategis pengembangan dan peningkatan SDM,
- (2)Belum adanya peta kompetensi kepegawaian,
- (3)Belum disusunnya Tugas pokok dan fungsi pegawai,
- (4)Belum adanya peta regulasi yang di perlukan guna menunjang pelayanan,
- (5)Fungsi penelitian dan pengembangan belum berjalan dengan optimal,
- (6)Belum adanya sistem reward dan punishment terhadap pegawai,
- (7)Perlu adanya system penyelenggaraan kedisiplinan pegawai,
- (8)Belum adanya ketentuan etika kerja pegawai,
- (9)Belum adanya penguatan kelembagaan forum kepegawaian yang sistematis.

Berbagai persoalan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak dalam,

Beni Febriansyah, et.al

Pelayanan dan teknik operasional khususnya dalam kedisiplinan pegawai, budaya Pelayanan yang belum memadai, kurangnya inovasi pegawai dalam pelayanan dan teknis operasional serta kecenderungan pegawai melaksanakan tugas secara rutin dan kurang termotivasi dalam melakukan berbagai terobosan dalam Pelayanan.

Bila dilihat dari desain strukturnya, organisasi menganut model birokrasi mesin (Mintzberg, 1983 :163) yang dicirikan dengan padatnya tugas – tugas operasional rutin yang harus dicapai melalui spesialisasi, peraturan perundang-undangan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, kekuasaan yang tersentralisasi, lingkup rentang kendali yang sempit dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai perintah.

Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan desain birokrasi mesin tersebut. Kenyataan ini terlihat dimana seksi sebagai operasional kegiatan belum mempunyai standart desain baku dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokoknya. Operasional prosedur merupakan pedoman yang berisi prosedur operasional standar yang ada

dalam organisasi yang akan digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, tindakan maupun penggunaan fasilitas termasuk dana dilakukan dengan tepat dan benar.

Dalam desain struktur juga terlihat penempatan bidang penataan ruang dengan seksi perencanaan tata ruang, Seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang dan seksi pemetaan dan pengukuran. Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Mintzberg karena lembaga yang berada pada posisi *middle line* adalah lembaga yang melakukan fungsi pelaksanaan kebijakan sedangkan bidang perencanaan, pelaporan adalah lembaga yang melakukan fungsi perencanaan. Perencanaan itu sendiri bukanlah pelaksanaan kebijakan akan tetapi pembuat kebijakan untuk dilaksanakan sehingga masuk fungsi pendukung atau supporting.

1.4 Analisis Aspek Sikap Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Penataan Ruang

Faktor sikap pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya suatu implementasi kebijakan, karena seringkali kegagalan implementasi kebijakan disebabkan para pelaksana tidak memahami sepenuhnya atas kebijakan yang dihadapi, terlebih apabila menolak

tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Untuk mengatasi hal itu, maka para pelaksana dituntut memiliki keahlian, dedikasi dan pemahaman tentang tujuan kebijakan.

Sikap aparatur pelaksana juga akan berdampak pada tanggungjawab yang diberikan dalam pelaksanaan tugas kaitannya dengan isi dan batas pertanggung jawaban. Dalam pertanggung jawaban terdapat dua aspek yaitu hukum dan pencapaian sasaran/tujuan. Lemahnya tanggungjawab para pelaksana implementasi kebijakan akan mengakibatkan tujuan kebijakan tidak tercapai.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada sejumlah kepala seksi diperoleh penjelasan bahwa semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagian besar belum menjalankan pelayanan secara baik termasuk dalam menjalankan kebijakan manajemen alternatif pelayanan publik. Data menunjukkan bahwa dalam hal pembuatan perencanaan anggaran, meskipun sesuai dengan aturan aturan dan telah diusulkan tidak semuanya disetujui untuk dilanjutkan dalam pembahasan dengan DPRD dalam APBD. Tanggung jawab yang telah dijalankan oleh unit yang satu tidak dapat ditindak lanjuti oleh unit kerja lainnya.

1.5. Analisis Dimensi Aspek Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Penataan Ruang

Lingkungan kebijakan merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam implementasinya. Jika kondisi lingkungan positif maka kebijakan akan menghasilkan dukungan positif pula, situasi ini akan membuat mereka berpartisipasi dalam mensukseskan lingkungan kebijakan. Sebaliknya jika lingkungan berpandangan negatif maka akan mengakibatkan benturan sikap sehingga proses implementasi terancam kurang berhasil atau bahkan gagal sama sekali.

Kondisi yang selalu berubah baik sosial budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun peraturan perundang-undangan membawa konsekwensi terhadap implementasi kebijakan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pelayanan publik, kondisi lingkungan sosial budaya, ekonomi, politik dan demografi setidaknya merupakan aspek lingkungan kebijakan yang mewarnai jalannya implementasi kebijakan perbaikan pelayanan publik.

Sejalan dengan informasi yang diberikan oleh informan pada dasarnya

para pejabat pelaksana dapat memberikan respon positif terhadap perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan, khususnya jika perubahan tersebut mendukung program. Oleh karenanya khusus dalam implementasi kebijakan anggaran,

Sejalan dengan keterangan informan, observasi dan kajian mendalam tentang aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam pelayanan publik. dapat dikatakan bahwa Kondisi yang selalu berubah baik sosial budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun peraturan perundang-undangan membawa konsekwensi terhadap pelayanan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan Tentang Tata Ruang Kota Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber – sumber kebijakan, komunikasi organisasi yang efektif antara stakeholder dan pemerintah daerah dalam kolaborasi pendanaan, ciri dari pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin belum berjalan optimal. Meskipun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin mengalami keterbatasan sumber dana, sarana dan sumber daya manusia, akan tetapi dengan adanya komunikasi antar organisasi yang efektif dari stakeholder dengan instansi terkait keterlibatan secara aktif dari pemerintah daerah melalui kolaborasi pendanaan menopang jalannya Implementasi kebijakan Tentang Tata Ruang Kota Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Saran

Agar Implementasi kebijakan Tentang Tata Ruang Kota Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan secara efektif dan membawa hasil sesuai dengan harapan maka daerah sebagai pelaksananya perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebagai input konseptual dalam pengembangan kebijakan Tentang Tata Ruang Kota Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

- Musi Banyuasin perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut berkenaan dengan kebijakan yang ada untuk mendapatkan rekomendasi dan arahan untuk perbaikan dalam kegiatan Implementasi kebijakan Tentang Tata Ruang Kota Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin pelayanan publik yang lebih baik lagi.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu Kebijakan Publik, khususnya terkait dengan Implementasi kebijakan Tentang Tata Ruang Kota Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin mengingat pentingnya hal tersebut, terlebih lagi dikaitkan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi. 1982, *Dasar Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ball, Donald A & Mc Culloch Wendell H. 2000. *Bisnis Internasional Buku 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Bardach, E. 1977. *The Imlementation Game, What Happen After A Become A Law*. Cambridge Mass: MIT Press.
- Barret, S.M., dan Fudge,C. 1981. *Examining The Policy-Action Relationship*. London: Metuen Inc.
- Carl V. Patton, David S. Sawicki. 1986. *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning*. Printice Hall.
- Creswel. W. John. 2002. *Research Design (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta : Kik Press.
- Duimairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta :Erlangga.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1976, *Policy Analysis*. Alabama : University Press.
- Edward III, George, C. 1980, *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fredrickson, George. 1988. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES
- Grindle, Marille S. 1980. *Polities and Policy Imlementation And Public Policy In The Third Word*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hasibuan, SP. Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : BumiAksara.
- Henry, Nicholas, 1998. *Public Administration an Public Affairs. Eight Edition. New*
- Hoghood, Brian W. Lewis, Gunn, A. 1984. *Policy Analisis For The Real World*. London : Oxford University Press.
- Islamy, M.I.. 2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. (2003) *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta.UGM.
- Lovelock, Christopher, 2005, *Service Marketing and Management*, New Jersey: Prentice Hall.
- M. SyamsulMa'Arif dan Hendri Tanjung. 2006. *Manajemen Operasi*. Jakarta: Grasindo.
- McCarthy, Jerome E & William D. Perreault, Jr.(1990). *Basic Marketing, A Managerial Approach*, 10th ed., Homewood, IL : Irwin.
- Moloeng, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Nafarudin. M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta :SalembaEmpat
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nigro, A Felix danNigro G Lloyd. 1970. *Modern Public Administration*. New York: Haper& Row Publisher.
- Panji, Anoraga, 2007. *PengantarBisnis* : Jakarta, RhinekaCipta.
- Patton, M. Q. 1987. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. California: Sage Publications, Inc.
- Pfiffner& Robert V. Presthus. 1967. *Public Administration*. New York, Ronald Press Co.
- Porter, Michael. E. (1994). *Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Jakarta. Bina Cipta Aksara.
- Prajudi, Atmosudirdjo, 1982, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Presman, J. & Wildavsky A. 1979. *Implementation*. California: Berkeley University.
- Robert K. Yin. 2002. *Case Study Research. Design and Methods*. Edisi ketiga. *Applied social research method series Volume 5*. Sage Publications. California.
- Rosenbloom, David. H. Ingraham. Patricia, W. 1992.*The Promise and Paradox Of Civil Service*. Pittsburgh: University of Pittsburgh.
- Saefullah, H.A. Djaja. 1993. *Metode Penelitian dan Teknik Penulisan*. Makalah dalam pelatihan peningkatan kemampuan aparat perencanaan di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Jawa Barat. Bandung.
- _____. 1999. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum Yang baik*.Jurnal Publik Vol. I Nomor I. Bandung : Unpad.
- Siagian, S.P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahjan, 2007. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahaan Universitas Padjadjaran.
- Tambunan, Tulus. 2001. *TransformasiEkonomi di Indonesia*. Jakarta : PT. Salemba Empat Patria.
- Tellis, Winston. 1997. *Introduction to Case Study. The Qualitative Report*, Volume 3, Number 2.
- Van Meter, Donalds& Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process" *Administration and Society* 6 (4) : 4. 45-88.

- Wahab, A,A. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: BumiAksara.
- Wibawa, S. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: CV. Intermedia
- Widodo, Joko. 2001. *Telaah Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*: Surabaya. Insan Cendekia.
- Willson and Heyyel. 1983. *Hand Book Of Modern Office Management and Administration Service*. McGraw Hill Inc. New Jersey.
- Zeithaml, Valarie A-Parasuraman A.and Berry, Leonard L. 1990. *Delivering Service Quality: Banlancing Custumer Perceptinon and Expectations*. New York: The Pree Press

PeraturanTerkait

Peraturan WaliKabupaten Musi Banyuasin Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin